

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Armia, M. S., 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang.
- Chazawi, A., 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang.
- Herimulyanto, A., 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jumroh, K. dan Ade Kokasih, 2019, *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, CV. Zigie Utama, Bengkulu.
- Kasiyanto, A., 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mahmud, A., 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Marzuki, P. M., 2021, *Penelitian Hukum Cet. XV*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mulyadi, L., 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, B. J., 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Pardede, R., 2021, *Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Qamar, N., dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Solikin, N., 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Yani, M. A. dan Sodikin, 2020, *Memahami Masalah Mendasar Mengapa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Sulit Diberantas: Suatu Tinjauan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

b. Jurnal dan Prosiding

Agustine, O. V., “*RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1, No. 2, April 2019: 1-6, <https://doi.org/10.25105/hpvh.v1i2.5546>

Akbar, R. M. F., “*Peran Penting Penyidik dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Sebagai Kunci Pada Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia*”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 10, Oktober 2024: 47-57, DOI: <https://doi.org/10.3783/causa.v6i9.6377>

Amanda, B., dan Ida Keumala Jempa, “*Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5, No. 4, Agustus 2021: 569-576.

Ante, S., “*Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, Mei 2013: 98-104.

Apriyani, M. A., et al., “*Pembaruan Peraturan Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Indonesia dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri*”, *Jurnal Crepido*, Vol. 5, No. 1, Juli 2023: 27-41, DOI: [10.14710/crepido.5.1.27-41](https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.27-41)

Aruan, U. M., “*Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHP*”, *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 2, Mei 2014: 77-85.

Buamona, S. S., “*Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Analisis Ekonomi*”, *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022: 155-165, DOI: <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i02.88>

Dewi, S. F., “*Optimalisasi Perampasan Aset oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, *Jurnal Recidive*, Vol. 13, No. 3, Desember 2024: 318-329, DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.85635>

Edbert, F., dan Tundjung Herning Sitabuana, “*Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi*”, *Serina IV UNTAR*, April 2022: 513-522.

- Fadillah, A. N., et al., “Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku Melalui Uang Pengganti”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 24, No. 2, Oktober 2023: 261-279, DOI: <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9827>
- Ferdian, R. B., et al, “Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No. 3, Desember 2018: 320-337, DOI: <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648>
- Hasoloan, R. J., et al., “The Spirit of the Anti-Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements”, *Journal of Creativity Student*, Vol. 7, No. 2, Desember 2022: 283-310, DOI: <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38207>
- Herianto, et al., “Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6, Juni 2023: 549-559, DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.189>
- Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Jurnal Al’ Adl*, Vol. 9, No. 3, Desember 2017: 319-336, DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Ilmi, M., et al., “Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022: 493-507, DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197>
- Janis, N., “Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12, No. 4, Desember 2023: 1-9.
- Jaya, A. M., “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cepalo*, Vol. 1, No. 1, Desember 2017: 21-30, DOI: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752>
- Pattimahu, S. F., et al, “Analisis Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 4, No. 2, Mei 2014: 82-95, DOI: <https://doi.org/10.19184/jak.v4i1.38798>
- Lineleyan, W. A., et al., “Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti”, *E-Journal UNSRAT*, Vol. 12, No. 5, September 2024: 1-12.

- Noya, N., et al., “*Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*”, *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 3, No. 1, April 2023: 12-38, DOI: <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1052>
- Rizki, W., et al, “*Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Indonesia*”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, No. 5, 2021: 1597-1616, DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23298>
- Sagita, A., “*Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1, November 2017: 21-43, DOI: <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1449>
- Sitorus, M. J., “*Kedudukan Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Aspek Keperdetaan*”, *Jurnal Equitable*, Vol. 5, No. 1, April 2020: 1-17, DOI: <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2463>
- Sosiawan, U. M., “*Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, Desember 2020: 587-604, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.587-604>
- Sudarnita, K. A., et al., “*Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal*”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2024: 77-83, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8595.77-83>
- Sudarto et al, “*Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017: 109-118, DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>
- Sumaidi, “*Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan Oleh Hukum*”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 8, No. 1, Juni 2016: 220-244, DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v8i1.93>
- Tinangon, N. P., et al, “*Tugas dan Wewenang Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti*”, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 12, Januari 2021: 137-147.

Wahyuni, C., “*Analisis Prosedur Penyitaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 5, Oktober 2024: 71-80, DOI: <https://doi.org/10.3783/causa.v6i5.6265>

Yadi, I., et al., “*Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Suloh, Vol. 12, No. 1, April 2024: 90-105, DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15814>

Zulfiani, A., et al., “*Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta*”, UNES Law Review, Vol. 5, No. 4, Juni 2023: 4303-4324, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.741>

c. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Herimulyanto, A., 2018, *Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ilmi, M., 2022, *Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, Makassar.

Makalalag, L., 2020, *Efektivitas Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.

Sanders, R. L., 2020, *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor PER-017/A/JA/07/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 999)

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491)

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069)

e. Putusan dan Penetapan Pengadilan

Penetapan Izin Penyitaan Nomor: 106/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Sby

Putusan PN Surabaya Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, 12 Juni 2024.

f. Website

Warjiyati, Sri. “Urgensi Ruu Perampasan Aset: Strategi Baru Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum Yang Lebih Adil”. <https://uinsa.ac.id/blog/urgensi-ruu-perampasan-aset-strategi-baru-dalam-pemberantasan-korupsi-menuju-sistem-hukum-yang-lebih-adil>, diakses 3 Juni 2025.

g. Lain-lain

Buku Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas

Wawancara dengan Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Malang